



2024



8 Oct 2024 at 11.19.33

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumber daya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Risiko selalu timbul dari segala aspek kehidupan dan bersinggungan langsung dengan sosial masyarakat. Informasi dan komunikasi yang memungkinkan masyarakat menjangkau dan berinteraksi secara bebas, tentunya dapat memunculkan delik negatif yang menggerus nilai-nilai sosial dan budaya yang telah disadari dan dipatuhi oleh masyarakat. Keberlanjutan nilai sosial, budaya, dan politik perlu dipertahankan dengan asas gotong royong dan kebersamaan, baik antar masyarakat sendiri maupun antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga terjadi sinergi positif yang dapat meminimalisir ataupun menghilangkan risiko.

Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan menjadi sarana untuk mendapatkan informasi, pelayanan, dan pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat. Program yang direncanakan dan diimplementasikan selalu berkaitan erat dengan kondisi terkini yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini merupakan bentuk

komitmen dan konsistensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan sebagai instansi pemerintah yang reaktif dan visioner dalam rangka manajemen resiko.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pengawas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan penyusunan laporan penilaian risiko tahun 2024 bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal- hal yang membutuhkan Solusi/rekomendasi kepada unit kepatuhan sebagai sarana pemilik risiko dalam mencapai tujuan Organisasi Perangkat Daerah.

D. RUANG LINGKUP

Kegiatan penilaian Resiko tahun 2024 di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan untuk mengetahui skala dampak dan intensitas terjadinya resiko yang sudah disusun terhadap pencapaian tugas dan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku pelaksana urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lamongan telah Menyusun register Resiko OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berwawasan kebangsaan serta sadar politik di Kabupaten Lamongan, Adapun resiko yang telah berhasil dikategorikan menjadi 2 yaitu resiko strategis dan operasional. kondisi lingkungan pengendalian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2024 berdasarkan pada dokumen hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern dapat dikategorikan memiliki nilai “memadai” sebagaimana tabel di bawah ini :

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN																																		
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)																																		
Pemerintah Kabupaten Lamongan																																		
2024																																		
Pemda		: Badan Penanggulangan Bencana																																
Daerah																																		
No	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																											SIMPULAN KUOSIONER CEE					
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27		R28	Modus			
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																											Memadai						
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya ketetadanan, pesan moral dll)	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Memadai			
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	Memadai		
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	Memadai		
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaktanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	4	2	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	Memadai		
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																											Memadai						
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	2	3	2	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	Memadai		
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	2	3	2	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	Memadai		
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	2	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	Memadai		
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkata.	4	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	Memadai		
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																											Memadai						
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Memadai		
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Memadai	
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggal pelaporan risiko/masalah	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	Memadai	
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	Memadai	
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	Memadai	
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasionat OPD (cascading)	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	Memadai	
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	4	2	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Memadai	
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Memadai
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																											Memadai						
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Memadai	
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	2	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Memadai	
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	4	2	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai	
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	Memadai

E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																												Memadai		
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	4	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Memadai	
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	4	2	2	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	Memadai	
3	Kewenangan direviu secara periodik	4	2	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	Memadai	
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																												Memadai		
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4	2	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	Memadai	
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	2	3	2	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	Memadai	
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	2	3	2	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	Memadai	
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	4	2	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	Memadai
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	2	2	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	2	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	4	1	2	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Memadai
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF																												Memadai		
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	4	2	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	4	2	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																												Memadai		
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Copyright © 2021 Memadai

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan mitigasi Resiko memiliki beberapa kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai sebagaimana berikut :

1. Adanya pegawai yang belum secara tepat mengisi posisi/jabatan. Masih adanya Nilai IP-ASN OPD yang masih rendah dan disebabkan dimensi kompetensi ASN yang rendah
2. Masih perlu dilakukan pembaruan susunan organisasi terhadap pejabat fungsional dan informasi terkait pedoman dalam penyusunannya.

Guna mengatasi lingkungan pengendalian yang kurang memadai di atas maka diperlukan beberapa strategi rencana tindak pengendalian perbaikan terhadap lingkungan pengendalian sebagaimana tabel sebagai berikut :

Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Pnyelelesaian
1	Kurang disiplinnya sebagian pegawai dalam mentaati ketentuan kehadiran	Melaksanakan pembinaan secara berkala	Kepala Dinas	12 Bulan
2	Sebagian jabatan diisi oleh pegawai yang tidak sesuai dengan pendidikannya	Akan dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi	Kepala Dinas	12 Bulan
3	Nilai SAKIP masih perlu ditingkatkan	Akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala	Kepala Dinas	12 Bulan
4	Masih Kurangnya Penjelasan Terkait Pejabat Fungsional	Akan dilaksanakan sosialisasi terkait penjelasan pejabat fungsional	Kepala Dinas	12 Bulan
5	Masih adanya jabatan yang belum terpenuhi sesuai kebutuhan	Akan dikoordinasi dengan instansi terkait	Kepala Dinas	12 Bulan
6	Kinerja pegawai sebagian masih kurang	Melaksanakan pembinaan secara berkala	Kepala Dinas	12 Bulan
7	Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah telah terpenuhi dengan cukup baik dan perlu ditingkatkan	Akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala	Kepala Dinas	12 Bulan
8	Hubungan kerja dengan instansi pemerintah terkait terpenuhi dengan cukup baik dan perlu ditingkatkan	Akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala	Kepala Dinas	12 Bulan

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memperhatikan dan mengacu pada casecading Misi III RPJMD di atas. Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni “Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana” dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah. Sehingga tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan adalah “Mewujudkan Kapasitas Ketangguhan dalam Penanggulangan Bencana”.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan penanggulangan bencana
2. Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Berdasarkan pada hasil analisis penyusunan register resiko, maka dapat dijabarkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana tugas urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lamongan memiliki resiko yang berhasil dianalisis yang terbagi kedalam resiko startegis dan resiko operasional sebagaimana matriks yang disajikan sebagai berikut :

Tabel Matriks Resiko Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kertas Kerja Strategis OPD
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Penilaian	2024
Periode yang Dinilai	2024
Tujuan Strategis	Meningkatkan ketahanan pangan daerah
Urusan Pemerintahan	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
OPD yang dinilai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tujuan Strategis Pemerintah	Meningkatkan ketahanan pangan daerah
Sasaran	Meningkatnya kualitas pangan

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Presentase Desa Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana	Belum tercapainya jumlah pembentukan desa tangguh bencana di daerah rawan bencana	RSO.24.39.07.01	Kepala Pelaksana BPBD/ Kepala Bidang Pencegahaan dan Kesiapsiagaan	Kurangnya alokasi anggaran dan partisipasi desa dalam pembentukan desa tangguh bencana	Internal / Eksternal	C	Masih banyak desa yang di daerah rawan bencana belum mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Masyarakat
2	Presentase Korban Terdampak Bencana yang Ditangani	Bertambahnya jumlah korban terdampak bencana yang tidak tertangani	RSO.24.39.07.02	Kepala Pelaksana BPBD/ Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Belum optimalnya koordinasi antar opd terkait dalam penanganan darurat bencana	Eksternal	C	Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam penanganan darurat bencana menurun	Masyarakat
3	Presentase Pemulihan Pasca Bencana yang Dilaksanakan	Belum terlayannya secara maksimal pemulihan pasca bencana di masyarakat	RSO.24.39.07.03	Kepala Pelaksana BPBD/ Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kurangnya alokasi anggaran dan tenaga terampil dalam perhitungan kerugian dan kerusakan pasca bencana	Internal	C	Perhitungan dan bantuan pasca bencana kurang optimal	Masyarakat
4	Nilai SAKIP BPBD	Nilai SAKIP BPBD menurun	RSO.24.39.07.04	Kepala Pelaksana BPBD/ Sekretaris BPBD	Laporan evaluasi tidak tepat waktu	Internal	C	Akuntabilitas kinerja instansi menurun	BPBD

Tabel Matriks Resiko Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tambah Kertas Kerja Operasional Pemda
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Penilaian	2024
Periode yang Dinilai	2024
Tujuan Strategis	
Sasaran strategis OPD	
Urusan Pemerintahan	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
OPD yang Dinilai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/U/C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi rawan bencana	Pelaksanaan	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap daerah rawan bencana	ROD.24.39.07.02	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Banyak masyarakat yang tidak mengetahui daerah rawan bencana	Eksternal	C	Menurunnya kewaspadaan masyarakat terhadap bencana	Masyarakat
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah masyarakat yang memperoleh pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan	Pelaksanaan	Kurangnya SDM yang mampu memberikan pelatihan	ROD.24.39.07.03	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Minimnya SDM yang telah mengikuti pelatihan penanggulangan bencana atau sertifikasi keahlian dalam bidang kebencanaan	Internal	C	Kurang optimalnya pelaksanaan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap masyarakat	Masyarakat
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelaksanaan	Belum maksimalnya respon cepat darurat bencana	ROD.24.39.07.04	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Keterbatasan sarana dan prasarana respon cepat darurat bencana	Internal	C	Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap respon cepat yang dilakukan BPBD	Masyarakat
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah bantuan stimulan bahan konstruksi dan dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana	Perencanaan	Terhambatnya penyaluran bantuan stimulan dan proses data perhitungan kebutuhan pasca bencana	ROD.24.39.07.05	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kurangnya koordinasi antar OPD terkait dalam menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana serta dalam penyaluran bantuan stimulan pasca bencana	Eksternal	C	Keterlambatan penyusunan dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana dan penyaluran bantuan stimulan	Masyarakat
5	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	Perencanaan	Adanya layanan kepada masyarakat pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana tidak maksimal	ROD.24.39.07.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan	Minimnya anggaran yang dialokasikan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana	Internal / Eksternal	C	Layanan penanggulangan bencana yang diterima masyarakat tidak optimal	Masyarakat

C. HASIL ANALISIS RISIKO

Berdasarkan pada matriks resiko strategis dan operasional di atas maka dapat dilakukan analisis terkait skala resiko yang akan dihadapi dalam urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lamongan ke depan, adapun skala risiko serta penyebab dan dampak risiko dapat kami sajikan melalui tabel berikut :

Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2024						
No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD							
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belum tercapainya jumlah pembentukan desa tangguh bencana di daerah rawan bencana	RSO.24.39.07.01	9	Kepala Pelaksana BPBD/ Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kurangnya alokasi anggaran dan partisipasi desa dalam pembentukan desa tangguh bencana	Masih banyak desa yang di daerah rawan bencana belum mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bertambahnya jumlah korban terdampak bencana yang tidak tertangani	RSO.24.39.07.02	6	Kepala Pelaksana BPBD/ Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Belum optimalnya koordinasi antar opd terkait dalam penanganan darurat bencana	Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam penanganan darurat bencana menurun
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belum terlayannya secara maksimal pemulihan pasca bencana di masyarakat	RSO.24.39.07.03	6	Kepala Pelaksana BPBD/ Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kurangnya alokasi anggaran dan tenaga terampil dalam perhitungan kerugian dan kerusakan pasca bencana	Perhitungan dan bantuan pasca bencana kurang optimal
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP BPBD menurun	RSO.24.39.07.04	9	Kepala Pelaksana BPBD/ Sekretaris BPBD	Laporan evaluasi tidak tepat waktu	Akuntabilitas kinerja instansi menurun
Risiko Operasional OPD							
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap daerah rawan bencana	ROO.24.39.07.02	4	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Banyak masyarakat yang tidak mengetahui daerah rawan bencana	Menurunnya kewaspadaan masyarakat terhadap bencana
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kurangnya SDM yang mampu memberikan pelatihan	ROO.24.39.07.03	9	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Minimnya SDM yang telah mengikuti pelatihan penanggulangan bencana atau sertifikasi keahlian dalam bidang kebencanaan	Kurang optimalnya pelaksanaan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap masyarakat
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belum maksimalnya respon cepat darurat bencana	ROO.24.39.07.04	9	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Keterbatasan sarana dan prasarana respon cepat darurat bencana	Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap respon cepat yang dilakukan BPBD
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terhambatnya penyaluran bantuan stimulan dan proses data perhitungan kebutuhan pasca bencana	ROO.24.39.07.05	12	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kurangnya koordinasi antar OPD terkait dalam menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana serta dalam penyaluran bantuan stimulan pasca bencana	Keterlambatan penyusunan dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana dan penyaluran bantuan stimulan
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Adanya layanan kepada masyarakat pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana tidak maksimal	ROO.24.39.07.01	9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan	Minimnya anggaran yang dialokasikan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana	Layanan penanggulangan bencana yang diterima masyarakat tidak optimal

Adapun rencana tindak pengendalian (RTP) terhadap risiko di atas yang berisi jadwal, celah pengendalian, pemilik/penanggung jawab, serta jadwal rencana target waktu penyelesaian risiko yang dihadapi dapat dijelaskan melalui matriks formulis kertas kerja sebagai berikut :

Formulir Kertas Kerja
Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2024						
Tujuan Strategis Pemda							
Urutan Pemerintahan	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
Dinas Terkait	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah:							
1	Belum tercapainya jumlah pembentukan desa tangguh bencana di daerah rawan bencana	RSO.24.39.07.01	Melaksanakan Monitoring Secara Berkala	Kurangnya pengendalian internal terhadap pelaksana kegiatan	Meningkatkan anggaran penanggulangan bencana dan mendorong komitmen opd	Kepala Pelaksana BPBD/ Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	12 Bulan
2	Bertambahnya jumlah korban terdampak bencana yang tidak tertangani	RSO.24.39.07.02	Melaksanakan Monitoring Secara Berkala	Kurangnya pengendalian internal terhadap pelaksana kegiatan	Meningkatkan koordinasi antar opd terkait dalam penanganan darurat bencana	Kepala Pelaksana BPBD/ Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	12 Bulan
3	Belum tertayannya secara maksimal pemulihan pasca bencana di masyarakat	RSO.24.39.07.03	Melaksanakan Monitoring Secara Berkala	Kurangnya pengendalian internal terhadap pelaksana kegiatan	Meningkatkan anggaran penanggulangan bencana dan mendorong pelatihan kepada tenaga terampil	Kepala Pelaksana BPBD/ Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	12 Bulan
4	Nilai SAKIP BPBD menurun	RSO.24.39.07.04	Melaksanakan Monitoring Secara Berkala	Kurangnya pengendalian internal terhadap pelaksana kegiatan	Laporan evaluasi tepat waktu	Kepala Pelaksana BPBD/ Sekretaris BPBD	12 Bulan
Risiko Operasional OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah:							
1	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap daerah rawan bencana	ROO.24.39.07.02	Melaksanakan Monitoring Secara Berkala	Kurangnya pengendalian internal terhadap pelaksana kegiatan	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal pada daerah rawan bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	12 Bulan
2	Kurangnya SDM yang mampu memberikan pelatihan	ROO.24.39.07.03	Melaksanakan Monitoring Secara Berkala	Kurangnya pengendalian internal terhadap pelaksana kegiatan	Memfasilitasi SDM BPBD untuk mengikuti pelatihan penanggulangan bencana atau sertifikasi keahlian dalam bidang kebencanaan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	12 Bulan
3	Belum maksimalnya respon cepat darurat bencana	ROO.24.39.07.04	Melaksanakan Monitoring Secara Berkala	Kurangnya pengendalian internal terhadap pelaksana kegiatan	Meningkatkan sarana prasarana respon cepat darurat bencana	Bidang Kedaruratan dan Logistik	12 Bulan
4	Terhambatnya penyaluran bantuan stimulan dan proses data perhitungan kebutuhan pasca bencana	ROO.24.39.07.05	Melaksanakan Monitoring Secara Berkala	Kurangnya pengendalian internal terhadap pelaksana kegiatan	Mem bentuk TIM Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang beranggotakan opd terkait	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	12 Bulan
5	Adanya layanan kepada masyarakat pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana tidak maksimal	ROO.24.39.07.01	Melaksanakan Monitoring Secara Berkala	Kurangnya pengendalian internal terhadap pelaksana kegiatan	Meningkatkan anggaran penanggulangan bencana dan mendorong peran serta masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan	12 Bulan

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Berikut akan dijabarkan mengenai pengendalian yang sudah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan terhadap penanggulangan risiko strategis dan operasional yang telah diidentifikasi dan telah dilaksanakan yang dapat kami jabarkan ke dalam matriks tabel sebagai berikut :

Formulir Kertas Kerja
Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan									
Tahun Penilaian	2024									
Tujuan Strategis Pemda										
Urusan Pemerintahan	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
Dinas Terkait	Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah:										
1	Belum tercapainya jumlah pembentukan desa tangguh bencana di daerah rawan bencana	RSO.24.39.07.01	Januari s/d Desember	Kurangnya alokasi anggaran dan komitmen opd dalam pembentukan desa tangguh bencana	Masih banyak desa yang di daerah rawan bencana belum mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-	Meningkatkan anggaran penanggulangan bencana dan mendorong komitmen opd	JAN - FEB	JAN - FEB	Telah dilaksanakan
2	Bertambahnya jumlah korban terdampak bencana yang tidak tertangani	RSO.24.39.07.02	Januari s/d Desember	Belum optimalnya koordinasi antar opd terkait dalam penanganan darurat bencana	Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam penanganan darurat bencana menurun	-	Meningkatkan koordinasi antar opd terkait dalam penanganan darurat bencana	APR - JUN	APR - JUN	Belum dilaksanakan
3	Belum terlayannya secara maksimal pemulihan pasca bencana di masyarakat	RSO.24.39.07.03	Januari s/d Desember	Kurangnya alokasi anggaran dan tenaga terampil dalam perhitungan kerugian dan kerusakan pasca bencana	Perhitungan dan bantuan pasca bencana kurang optimal	-	Meningkatkan anggaran penanggulangan bencana dan mendorong pelatihan kepada tenaga terampil	JULI - SEPT	JULI - SEPT	Belum dilaksanakan
4	Nilai SAKIP BPBD menurun	RSO.24.39.07.04	Januari s/d Desember	Laporan evaluasi tidak tepat waktu	Akuntabilitas kinerja instansi menurun	-	Laporan evaluasi tepat waktu	OCT - DES	OCT - DES	Belum dilaksanakan

Risiko Operasional OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah:										
1	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap daerah rawan bencana	ROO.24.39.07.02	Januari s/d Desember	Banyak masyarakat yang tidak mengetahui daerah rawan bencana	Menurunnya kewaspadaan masyarakat terhadap bencana	-	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal pada daerah rawan bencana	JAN - MAR	JAN - MAR	Telah dilaksanakan
2	Kurangnya SDM yang mampu memberikan pelatihan	ROO.24.39.07.03	Januari s/d Desember	Minimnya SDM yang telah mengikuti pelatihan penanggulangan bencana atau sertifikasi keahlian dalam bidang kebencanaan	Kurang optimalnya pelaksanaan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap masyarakat	-	Memfasilitasi SDM BPBD untuk mengikuti pelatihan penanggulangan bencana atau sertifikasi keahlian dalam bidang kebencanaan	APR - JUN	APR - JUN	Belum dilaksanakan
3	Belum maksimalnya respon cepat darurat bencana	ROO.24.39.07.04	Januari s/d Desember	Keterbatasan sarana dan prasarana respon cepat darurat bencana	Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap respon cepat yang dilakukan BPBD	-	Meningkatkan sarana prasarana respon cepat darurat bencana	APR - JUN	APR - JUN	Belum dilaksanakan
4	Terhambatnya penyaluran bantuan stimulan dan proses data perhitungan kebutuhan pasca bencana	ROO.24.39.07.05	Januari s/d Desember	Kurangnya koordinasi antar OPD terkait dalam menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana	Keterlambatan penyusunan dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana	-	Membentuk TIM Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang beranggotakan opd terkait	JULI - SEPT	JULI - SEPT	Belum dilaksanakan
5	Adanya layanan kepada masyarakat pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana tidak maksimal	ROO.24.39.07.01	Januari s/d Desember	Minimnya anggaran yang dialokasikan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana	Layanan penanggulangan bencana yang diterima masyarakat tidak optimal	-	Meningkatkan anggaran penanggulangan bencana dan mendorong peran serta masyarakat	OCT - DES	OCT - DES	Belum dilaksanakan

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Pengendalian yang masih dibutuhkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Formulir Kertas Kerja
Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2024						
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
Dinas Terkait	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah:							
1	Belum tercapainya jumlah pembentukan desa tangguh bencana di daerah rawan bencana	RSO.24.39.07.01	Melaksanakan Monitoring Secara Berkala	Kurangnya pengendalian internal terhadap pelaksana kegiatan	Meningkatkan anggaran penanggulangan bencana dan mendorong komitmen opd	Kepala Pelaksana BPBD/ Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	12 Bulan
2	Bertambahnya jumlah korban terdampak bencana yang tidak tertangani	RSO.24.39.07.02	Melaksanakan Monitoring Secara Berkala	Kurangnya pengendalian internal terhadap pelaksana kegiatan	Meningkatkan koordinasi antar opd terkait dalam penanganan darurat bencana	Kepala Pelaksana BPBD/ Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	12 Bulan
3	Belum terlayannya secara maksimal pemulihan pasca bencana di masyarakat	RSO.24.39.07.03	Melaksanakan Monitoring Secara Berkala	Kurangnya pengendalian internal terhadap pelaksana kegiatan	Meningkatkan anggaran penanggulangan bencana dan mendorong pelatihan kepada tenaga terampil	Kepala Pelaksana BPBD/ Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	12 Bulan
4	Nilai SAKIP BPBD menurun	RSO.24.39.07.04	Melaksanakan Monitoring Secara Berkala	Kurangnya pengendalian internal terhadap pelaksana kegiatan	Laporan evaluasi tepat waktu	Kepala Pelaksana BPBD/ Sekretaris BPBD	12 Bulan
Risiko Operasional OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah:							
1	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap daerah rawan bencana	ROO.24.39.07.02	Melaksanakan Monitoring Secara Berkala	Kurangnya pengendalian internal terhadap pelaksana kegiatan	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal pada daerah rawan bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	12 Bulan
2	Kurangnya SDM yang mampu memberikan pelatihan	ROO.24.39.07.03	Melaksanakan Monitoring Secara Berkala	Kurangnya pengendalian internal terhadap pelaksana kegiatan	Memfasilitasi SDM BPBD untuk mengikuti pelatihan penanggulangan bencana atau sertifikasi keahlian dalam bidang kebencanaan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	12 Bulan
3	Belum maksimalnya respon cepat darurat bencana	ROO.24.39.07.04	Melaksanakan Monitoring Secara Berkala	Kurangnya pengendalian internal terhadap pelaksana kegiatan	Meningkatkan sarana prasarana respon cepat darurat bencana	Bidang Kedaruratan dan Logistik	12 Bulan
4	Terhambatnya penyaluran bantuan stimulan dan proses data perhitungan kebutuhan pasca bencana	ROO.24.39.07.05	Melaksanakan Monitoring Secara Berkala	Kurangnya pengendalian internal terhadap pelaksana kegiatan	Membentuk TIM Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang beranggotakan opd terkait	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	12 Bulan
5	Adanya layanan kepada masyarakat pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana tidak maksimal	ROO.24.39.07.01	Melaksanakan Monitoring Secara Berkala	Kurangnya pengendalian internal terhadap pelaksana kegiatan	Meningkatkan anggaran penanggulangan bencana dan mendorong peran serta masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan	12 Bulan

BAB IV

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kesuksesan Pengendalian risiko strategis dan operasional OPD salah satunya dipengaruhi oleh faktor informasi dan komunikasi. Faktor informasi dan komunikasi diperlukan dalam penyampaian risiko strategis dan operasional serta rencana tindak pengendalian dalam menangani terjadinya risiko dalam urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lamongan. Berikut akan dijabarkan mengenai rancangan informasi dan komunikasi yang telah disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke dalam matriks sebagai berikut:

Tabel Rancangan Infokom

Formulir Kertas Kerja Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2024
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Dinas Terkait	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah:							
1	Meningkatkan anggaran penanggulangan bencana dan mendorong komitmen opd	Diadakan rapat internal	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Masyarakat	JAN - FEB	JAN - FEB	Telah dilaksanakan
2	Meningkatkan koordinasi antar opd terkait dalam penanganan darurat bencana	Diadakan rapat internal	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Masyarakat	APR - JUN	APR - JUN	Belum dilaksanakan
3	Meningkatkan anggaran penanggulangan bencana dan mendorong pelatihan kepada tenaga terampil	Diadakan rapat internal	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Masyarakat	JULI - SEPT	JULI - SEPT	Belum dilaksanakan
4	Laporan evaluasi tepat waktu	Diadakan rapat internal	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Masyarakat	OCT - DES	OCT - DES	Belum dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah:							
1	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal pada daerah rawan bencana	Diadakan rapat internal	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Masyarakat	JAN - MAR	JAN - MAR	Telah dilaksanakan
2	Memfasilitasi SDM BPBD untuk mengikuti pelatihan penanggulangan bencana atau sertifikasi keahlian dalam bidang kebencanaan	Diadakan rapat internal	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Masyarakat	APR - JUN	APR - JUN	Belum dilaksanakan
3	Meningkatkan sarana prasarana respon cepat darurat bencana	Diadakan rapat internal	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Masyarakat	APR - JUN	APR - JUN	Belum dilaksanakan
4	Membentuk TIM Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang beranggotakan opd terkait	Diadakan rapat internal	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Masyarakat	JULI - SEPT	JULI - SEPT	Belum dilaksanakan
5	Meningkatkan anggaran penanggulangan bencana dan mendorong peran serta masyarakat	Diadakan rapat internal	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Masyarakat	OCT - DES	OCT - DES	Belum dilaksanakan

BAB V

RANCANGAN PEMANTAUAN

Pengendalian dan pemantauan risiko merupakan salah satu factor dalam penentuan keberhasilan sebuah organisasi dalam pelaksanaan tugas serta pencapaian target dan kinerja organisasi perangkat daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana tugas urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat guna menghadapi risiko-risiko yang diidentifikasi dalam pencapaian tujuan organisasi maka disusun sebuah rancangan pemantauan yang dapat kami kabarkan melalui matriks tabel sebagaimana berikut :

Tabel Rancangan Pemantauan

Formulir Kertas Kerja
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2024
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Dinas Terkait	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah:						
1	Meningkatkan anggaran penanggulangan bencana dan mendorong komitmen opd	melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Badan	JAN - FEB	JAN - FEB	Telah dilaksanakan
2	Meningkatkan koordinasi antar opd terkait dalam penanganan darurat bencana	melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Badan	APR - JUN	APR - JUN	Belum dilaksanakan
3	Meningkatkan anggaran penanggulangan bencana dan mendorong pelatihan kepada tenaga terampil	melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Badan	JULI - SEPT	JULI - SEPT	Belum dilaksanakan
4	Laporan evaluasi tepat waktu	melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Badan	OCT - DES	OCT - DES	Belum dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah:						
1	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal pada daerah rawan bencana	melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Badan	JAN - MAR	JAN - MAR	Telah dilaksanakan
2	Memfasilitasi SDM BPBD untuk mengikuti pelatihan penanggulangan bencana atau sertifikasi keahlian dalam bidang kebencanaan	melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Badan	APR - JUN	APR - JUN	Belum dilaksanakan
3	Meningkatkan sarana prasarana respon cepat darurat bencana	melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Badan	APR - JUN	APR - JUN	Belum dilaksanakan
4	Membentuk TIM Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang beranggotakan opd terkait	melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Badan	JULI - SEPT	JULI - SEPT	Belum dilaksanakan
5	Meningkatkan anggaran penanggulangan bencana dan mendorong peran serta masyarakat	melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Badan	OCT - DES	OCT - DES	Belum dilaksanakan

BAB VI

PENUTUP

Dari hasil yang telah dijabarkan di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa . Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan telah menyusun dokumen dalam pengelolaan risiko sesuai dengan kaidah dan semoga dokumen penilaian risiko tahun 2024 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai panduan dalam penanganan dan identifikasi risiko dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD dalam tugas urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lamongan.



Plt. KALAKSA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN

JOKO RAHARTO, S.STP., M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19780514 199711 1 001